



PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO)
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN KECIL

Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO)
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL**

Daftar Isi

Halaman

Surat Pernyataan Pengurus

Laporan Auditor Independen

**Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020**

Laporan Posisi Keuangan	1
Laporan Penghasilan Komprehensif	2
Laporan Perubahan Aset Neto	3
Laporan Arus Kas	4
Catatan atas Laporan Keuangan	5



**SURAT PERNYATAAN PENGELOLA TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 DESEMBER 2021**

PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO)

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- | | | | |
|----|---------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|
| 1. | Nama | : | Ujang Krisno |
| | Alamat Kantor | : | Jl. Moch. Toha No. 77
Bandung |
| | Alamat Domisili sesuai KTP atau Kartu
Identitas Lain | : | Jl. Batik Agung No. 19 Sukaluyu / Bandung
NIP.199309071 |
| | Nomor Telepon | : | 022-5201501 |
| | Jabatan | : | Manager |
| 2. | Nama | : | Wagiyati |
| | Alamat Kantor | : | Jl. Moch. Toha No. 77
Bandung |
| | Alamat Domisili sesuai KTP atau Kartu
Identitas Lain | : | Komp. GBA 2 Blok D2 No. 10 Bandung
NIP.202103003 |
| | Nomor Telepon | : | 022-5201501 |
| | Jabatan | : | Wakil Ketua |

Menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PUMK PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero);
2. Laporan keuangan PUMK telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (SAK – ETAP);
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan PUMK telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan PUMK tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; dan
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dan aplikasinya di dalam PUMK.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya

Bandung, 1 April 2022
Atas Nama dan Mewakili Pengurus Unit PUMK

Ketua

Wakil Ketua

Ujang Krisno

Wagiyati



PT.Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)

Kantor Pusat :

Jl. Moch. Toha No. 77
Bandung 40253
Tlp. : (62-22) 5201501
Fax. : (62-22) 5202444
E-mail : info@inti.co.id

Pabrik :

Jl. Moch. Toha No. 225
Palasari - Bandung 40258

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan
Registered Public Accountants

RSM Indonesia
Plaza ASIA, Level 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59
Jakarta 12190 Indonesia

T +62 21 5140 1340
F +62 21 5140 1350

www.rsm.id

Nomor : 00324/2.1030/AU.2/12/0645-2/1/IV/2022

Laporan Auditor Independen

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi serta
Pengelola Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil
PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)

Kami telah mengaudit laporan keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2021, serta laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lain.

Tanggung jawab pengelola atas laporan keuangan

Pengelola Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Pengelola untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh pengelola, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
AUDIT | TAX | CONSULTING

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) tanggal 31 Desember 2021, serta hasil aktivitas dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.

Hal lain

PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) menyajikan laporan keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (laporan PKBL) tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sebagai informasi komparatif atas laporan keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (laporan PUMK) tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) tidak menyajikan kembali laporan PKBL untuk menyesuaikan transaksi dan saldo terkait Program Bina Lingkungan, dan sebagai akibatnya, laporan PUMK ini belum tentu dapat diperbandingkan dengan laporan PKBL tersebut.

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan**Dedy Sukrisnadi**

Nomor Izin Akuntan Publik: AP.0645

Jakarta, 1 April 2022



00324

PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO)
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN KECIL
LAPORAN POSISI KEUANGAN

Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	2021 Rp	2020 Rp
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan Bank	3	326.700.530	142.175.624
Piutang Pinjaman Mitra Binaan <i>(Setelah dikurangi penyisihan piutang mitra binaan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp1.308.312.443 dan Rp1.363.102.600)</i>	4	3.579.495.077	3.483.590.994
Total Aset Lancar		<u>3.906.195.607</u>	<u>3.625.766.618</u>
Aset Tidak Lancar			
Aset Tetap	5	--	--
Aset Lain-lain	6	--	--
Aset Tetap Tidak Berfungsi		28.477.750	28.477.750
Akumulasi Penurunan Nilai		(28.477.750)	(28.477.750)
Piutang Bermasalah		4.316.437.323	4.373.379.656
Akumulasi Penurunan Nilai		(4.316.437.323)	(4.373.379.656)
Total Aset Tidak Lancar		<u>--</u>	<u>--</u>
TOTAL ASET		<u>3.906.195.607</u>	<u>3.625.766.618</u>
LIABILITAS DAN ASET NETO			
Liabilitas Jangka Pendek			
Utang Lain-lain	7	135.922.648	136.832.648
TOTAL LIABILITAS		<u>135.922.648</u>	<u>136.832.648</u>
ASET NETO			
Tanpa Pembatasan dari Pemberi Sumber Daya	8	3.770.272.959	3.488.933.970
TOTAL LIABILITAS DAN ASET NETO		<u>3.906.195.607</u>	<u>3.625.766.618</u>

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO)
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN KECIL
LAPORAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF
 Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
 Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
 (Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	2021 Rp	2020 Rp
TANPA PEMBATASAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA			
PENDAPATAN			
	9		
Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman		147.692.944	135.771.383
Pendapatan Bunga Deposito dan Jasa Giro		7.280.735	3.300.259
Pemulihan Penyisihan Piutang		54.790.157	--
Pemulihan Nilai Piutang Bermasalah		56.942.333	39.742.167
Lainnya		22.058.300	5.188.640
TOTAL PENDAPATAN		288.764.469	184.002.449
BEBAN LAINNYA			
	4, 10		
Beban Administrasi dan Umum		4.176.647	2.379.730
Beban Penyisihan Piutang	4, 10	--	558.710.308
Beban Lain-lain		3.248.833	--
TOTAL BEBAN		7.425.480	561.090.038
SURPLUS (DEFISIT)		281.338.989	(377.087.589)
DENGAN PEMBATASAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA			
		--	--
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			
		--	--
TOTAL PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF		281.338.989	(377.087.589)

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO)
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN KECIL
LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO
 Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
 Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
 (Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

	2021	2020
	Rp	Rp
ASET NETO TANPA PEMBATASAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA		
Saldo Awal	3.488.933.970	3.866.021.559
Surplus (Defisit)	281.338.989	(377.087.589)
Saldo Akhir	3.770.272.959	3.488.933.970
Penghasilan Komprehensif Lain	--	--
ASET NETO DENGAN PEMBATASAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA	--	--
TOTAL ASET NETO	3.770.272.959	3.488.933.970

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO)
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN KECIL
LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
 (Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

	2021	2020
	Rp	Rp
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
PENERIMAAN KAS DARI:		
Penerimaan Pinjaman dari Mitra Binaan	2.267.959.574	2.018.042.706
Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman	147.692.944	135.771.383
Penerimaan yang Belum Teridentifikasi	--	6.200.000
Pendapatan Bunga Deposito dan Jasa Giro	7.280.735	3.300.259
Pendapatan Lainnya	21.678.300	5.670.000
SUB TOTAL	2.444.611.553	2.168.984.348
PENGELUARAN KAS UNTUK:		
Penyaluran Pinjaman Kemitraan	(2.255.000.000)	(2.120.000.000)
Pengembalian Kelebihan Angsuran	(910.000)	(1.440.480)
Beban Administrasi dan Umum	(4.176.647)	(2.379.730)
SUB TOTAL	(2.260.086.647)	(2.123.820.210)
KAS NETO YANG DITERIMA DARI		
AKTIVITAS OPERASI	184.524.906	45.164.138
Kenaikan Neto Kas dan Setara Kas	184.524.906	45.164.138
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	142.175.624	97.011.486
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	326.700.530	142.175.624

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO)
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN KECIL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

1. Informasi Umum

1.1 Pendirian dan Informasi Umum

Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil ("PUMK") merupakan program kemitraan untuk meningkatkan kemampuan usaha mikro dan kecil agar menjadi tangguh dan mandiri.

PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) ("Perusahaan") merupakan salah satu BUMN yang seluruh modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Sebagai sebuah BUMN, Perusahaan merupakan salah satu pelaku ekonomi nasional di samping usaha swasta dan koperasi yang mengemban misi pemerintah dalam mendorong kegiatan dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan serta terciptanya pemerataan pembangunan melalui perluasan lapangan kerja, kesempatan berusaha dan pemberdayaan masyarakat. Dalam mengemban misi tersebut bentuk partisipasi Perusahaan dilakukan melalui PUMK. Dengan PUMK diharapkan peran aktif BUMN dapat memberikan kemanfaatan bagi pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, pembangunan lingkungan serta pembangunan hukum dan tata kelola bagi Perusahaan, serta dapat berkontribusi pada penciptaan nilai tambah bagi perusahaan dengan prinsip yang terintegrasi, terarah dan terukur dampaknya serta akuntabel dan membina usaha mikro dan usaha kecil agar lebih tangguh dan mandiri serta masyarakat sekitar perusahaan.

Untuk melaksanakan tujuan pendirian BUMN guna turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, dan pembinaan masyarakat sekitar BUMN, telah ditetapkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015, tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL) Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali oleh PER-03/MBU/12/2016 tanggal 16 Desember 2016, PER-02/MBU/07/2017 tanggal 5 Juli 2017 dan PER-02/MBU/04/2020 tanggal 2 April 2020 semua peraturan tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku setelah diterbitkannya peraturan Menteri BUMN Nomor PER - 05/MBU/04/2021 tanggal 8 April 2021, tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Badan Usaha Milik Negara.

Program TJSL (dahulu PKBL) sebagai bentuk kepedulian Perusahaan dan tanggung jawab sosial BUMN yang di dalamnya mengandung unsur tanggung jawab sosial dan turut membantu/mendorong pengembangan peningkatan ekonomi kerakyatan dalam lingkungan wilayah kerja maupun masyarakat pada umumnya, dibentuk pada tanggal 28 Juli 2008 berdiri sebagai bagian tersendiri dalam Perusahaan sesuai arahan dari Kementerian BUMN agar dapat secara mandiri mampu mengembangkan serta berkiprah sejalan dengan tujuan BUMN di lingkungannya dan sebagai implementasi kepedulian sosial perusahaan terhadap lingkungan (*Corporate Social Responsibility/CSR*).

Perusahaan menyelenggarakan Program PUMK dengan membentuk unit kerja khusus di bawah pembinaan Direktur Utama. Pembentukan unit kerja tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemampuan usaha Mitra Binaan serta pemberdayaan masyarakat di lingkungan sekitar lokasi Perusahaan. Unit kerja khusus ini berlokasi di Jalan Mohammad Toha No. 77 Bandung dan wilayah kerjanya meliputi kabupaten dan kotamadya di Provinsi Jawa Barat.

Hingga laporan ini diterbitkan, Surat Keputusan Direksi tentang Pelaksanaan Program TJSL 2021 masih dalam proses penyusunan. Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan 2020 didasarkan pada Surat Keputusan Direksi No. KN.009/2018 tanggal 5 Juli 2018 yang diubah dengan Surat Keputusan Direksi PT INTI No. KN.002/2019 tanggal 30 Januari 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.

1.2 Kegiatan Utama

Program PUMK dilakukan dalam bentuk pembiayaan dan pendanaan usaha mikro dan usaha kecil dan bantuan kegiatan lainnya. BUMN dapat secara khusus membentuk Program Pendanaan UMK. Program Pendanaan UMK pada pokoknya dilakukan dalam bentuk pinjaman pembiayaan kepada usaha mikro dan usaha kecil binaan BUMN.

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO)
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN KECIL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

1.3 Struktur Organisasi

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: KN.036/2020 tanggal 15 Desember 2020 tentang Struktur Organisasi Perusahaan dan KD. 257/KP.09/021100/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Penempatan Ulang Karyawan Di Lingkungan Perusahaan PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero), susunan pengurus PKBL (atau TJSL) adalah sebagai berikut:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Direktur Utama	Otong lip	Otong lip
Divisi Sekper dan Renstra Bangbis	Rizqi Ayunda Pratama	Gde Pandit Andika Wicaksono
Bagian PKBL (atau TJSL)	Ujang Krisno	Uus Lukman
Senior Officer	Ahmad Santosa B. Wagiyati A. Iskan	Dedi Suhendi Wagiyati A. Iskan

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Penting

a Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan pengelolaan dana PUMK disusun sesuai Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2012 sesuai dengan Surat Edaran BUMN Nomor SE-02/MBU/Wk/2012 yang bentuk penyajiannya mengacu pada pernyataan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (Revisi 2019) ISAK 35 tentang "Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba." yang ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Surat Edaran Menteri BUMN No. SE-01/D5.MBU/2012 tanggal 27 Maret 2012 tentang Petunjuk Teknis Penerapan Pedoman Akuntansi PKBL Revisi 2012 yang berlaku bagi PUMK yang berada di bawah naungan BUMN Pembina.

Laporan keuangan Program PUMK, kecuali untuk laporan arus kas disajikan berdasarkan konsep biaya historis dan konsep akrual. Laporan arus kas menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas yang diklasifikasikan dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan, dan disajikan dengan menggunakan metode langsung. Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan adalah mata uang Rupiah yang juga merupakan mata uang fungsionalnya. Seluruh angka dalam laporan keuangan ini disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan secara khusus.

b Kas dan Bank

Kas dan Bank adalah saldo kas dan saldo rekening bank PUMK Perusahaan untuk membiayai kegiatan PUMK Perusahaan.

c Piutang Pinjaman Mitra Binaan

Piutang Pinjaman Mitra Binaan adalah pinjaman yang disalurkan oleh Unit PKBL (atau TJSL) kepada Mitra Binaan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Piutang Pinjaman Mitra Binaan diakui pada saat pinjaman tersebut disalurkan kepada Mitra Binaan melalui transfer maupun diserahkan secara tunai kepada Mitra Binaan dan diukur serta dicatat sebesar jumlah bersih/pokok yang diharapkan dapat ditagih dari Mitra Binaan, yaitu pokok piutang Mitra Binaan dikurangi penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER - 05/MBU/04/2021, penggolongan kualitas pinjaman ditetapkan sebagai berikut:

- Lancar, adalah pembayaran angsuran pokok dan jasa administrasi pinjaman tepat waktu atau terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman selambat-lambatnya 30 hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama.
- Kurang lancar, apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 30 hari dan belum melampaui 180 hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama.

PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO)
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN KECIL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

- Diragukan, apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 180 hari dan belum melampaui 270 hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama.
- Macet, apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 270 hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama.

d Piutang Pinjaman Mitra Binaan

Untuk tujuan evaluasi penurunan nilai secara kolektif. Pinjaman kemitraan dikelompokkan berdasarkan kesamaan karakteristik risiko kredit seperti mempertimbangkan segmentasi nasabah (mitra binaan) dan status tunggakan. Karakteristik yang dipilih adalah relevan dengan estimasi arus kas masa depan dari kelompok pinjaman tersebut yang mengindikasikan kemampuan debitur (mitra binaan) untuk membayar seluruh pinjaman yang jatuh tempo sesuai persyaratan kontrak dari aset yang dievaluasi.

Arus kas masa datang dari kelompok aset keuangan yang penurunan nilainya dievaluasi secara kolektif, diestimasi berdasarkan kerugian historis yang pernah dialami atas aset-aset yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa dengan dengan karakteristik risiko kredit kelompok tersebut didalam bank. Kerugian historis yang pernah dialami kemudian disesuaikan berdasarkan data terkini yang dapat diobservasi untuk mencerminkan kondisi saat ini yang tidak berpengaruh pada periode terjadinya kerugian historis tersebut dan untuk menghilangkan pengaruh kondisi yang ada pada periode historis namun sudah tidak ada lagi saat ini.

Alokasi penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman diakui saat akhir periode akuntansi dan diukur dan dicatat sebesar estimasi kerugian yang tidak dapat ditagih. Metode perhitungan yang dipilih adalah secara kolektif berdasarkan persentase tertentu ketertagihan (*collection*) data historis yang ada (minimal 2 tahun).

Alokasi penyisihan penurunan nilai piutang didebet ketika terjadi jumlah alokasi penyisihan piutang tahun berjalan lebih kecil daripada jumlah alokasi penyisihan piutang pada tahun sebelumnya atau ketika direklasifikasi menjadi alokasi penyisihan piutang bermasalah.

Terhadap kualitas pinjaman kurang lancar, diragukan dan macet dapat dilakukan usaha-usaha pemulihan pinjaman dengan cara penjadwalan kembali (*rescheduling*) atau penyesuaian persyaratan (*reconditioning*) apabila memenuhi kriteria:

- 1) Mitra binaan beritikad baik atau kooperatif terhadap upaya penyelamatan yang akan dilakukan;
- 2) Usaha mitra binaan masih berjalan dan mempunyai prospek usaha;
- 3) Mitra binaan masih mempunyai kemampuan untuk membayar angsuran.

Dalam hal dilakukan tindakan penyesuaian persyaratan (*reconditioning*), tunggakan jasa administrasi pinjaman dapat dihapuskan dan/atau beban jasa administrasi pinjaman selanjutnya yang belum jatuh tempo.

Tindakan penyesuaian persyaratan (*reconditioning*) dilakukan setelah adanya tindakan penjadwalan kembali (*rescheduling*).

e Piutang Bermasalah

Piutang pinjaman macet yang telah diupayakan pemulihannya (*rescheduling* dan *reconditioning*) namun tidak terpulihkan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Piutang bermasalah diakui pada saat piutang pinjaman macet dipindahkan sebagai piutang bermasalah, diukur dan disajikan sebesar nihil yaitu nilai pokok pinjaman dikurangi penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman bermasalah yang nilainya sama dengan nilai pokok pinjaman.

f Piutang Jasa Administrasi Pinjaman

Besarnya jasa administrasi pinjaman dana program kemitraan ditetapkan satu kali pada saat pemberian pinjaman yaitu sebesar 6% (enam persen) per tahun dari saldo pinjaman awal tahun.

PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO)
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN KECIL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Apabila pinjaman/pembiayaan diberikan berdasarkan prinsip jual beli maka proyeksi margin yang dihasilkan disetarakan dengan margin sebesar 6% (enam persen) per tahun dari saldo pinjaman awal tahun.

Apabila pinjaman/pembiayaan diberikan berdasarkan prinsip bagi hasil maka rasio bagi hasilnya untuk BUMN Pembina adalah mulai dari 10% (10:90) sampai dengan maksimal 50% (50:50) berdasarkan perjanjian.

Sesuai PER 05.MBU/04/2021, modal kerja yang diberikan dalam bentuk pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki besaran jasa administrasi sebesar 6% (enam persen) per tahun dengan jangka waktu/tenor pinjaman maksimal selama 3 (tiga) tahun.

Apabila pembiayaan dalam bentuk syariah diberikan berdasarkan :

- a. prinsip jual beli maka proyeksi margin yang dihasilkan disetarakan dengan margin sebesar jasa administrasi sebagaimana dimaksud padapasal 12 ayat (2); atau
- b. prinsip bagi hasil maka rasio bagi hasilnya untuk BUMN adalah mulai dari 10% (sepuluh persen) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh persen) berdasarkan perjanjian.

g Aset Tetap

Aset tetap diukur sebesar biaya perolehannya. Biaya perolehan berdasarkan atas harga beli ditambah semua biaya yang dikeluarkan sampai aset tetap tersebut siap untuk digunakan.

Biaya perolehan aset tetap meliputi:

- 1) harga beli, termasuk biaya hukum dan broker, bea impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan, setelah dikurangi diskon pembelian dan potongan lainnya;
- 2) biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan maksud manajemen. Biaya-biaya ini termasuk biaya penyiapan lahan untuk pabrik, biaya penanganan dan penyerahan awal, biaya instalasi dan perakitan, dan biaya pengujian fungsionalitas;
- 3) estimasi awal biaya pembongkaran aset, biaya pemindahan aset dan biaya restorasi lokasi. Kewajiban atas biaya tersebut timbul ketika aset tersebut diperoleh atau karena entitas menggunakan aset tersebut selama periode tertentu bukan untuk menghasilkan persediaan.

Biaya-biaya berikut ini bukan merupakan biaya perolehan aset tetap dan harus diakui sebagai beban ketika terjadi:

- 1) Biaya pembukaan fasilitas baru;
- 2) Biaya pengenalan produk atau jasa baru (termasuk biaya aktivitas iklan dan promosi);
- 3) Biaya penyelenggaraan bisnis di lokasi baru atau kelompok pelanggan baru (termasuk biaya pelatihan staf);
- 4) Biaya administrasi dan *overhead* umum lainnya.

Pendapatan dan beban yang terkait dengan kegiatan insidental selama masa konstruksi atau pengembangan aset tetap diakui dalam laporan aktivitas jika operasional tersebut tidak diperlukan untuk membawa aset tetap ke lokasi dan kondisi operasi yang dimaksud.

Aset tetap yang dibangun sendiri, nilai perolehannya didasarkan atas seluruh biaya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset yang bersangkutan.

Aset tetap yang diperoleh melalui transaksi sewa beli (*purchase leasing*), nilai perolehannya dicatat berdasarkan seluruh nilai tunai biaya yang dibebankan dalam kontrak sewa beli.

Jika aset tetap diperoleh melalui pertukaran dengan aset nonmoneter atau kombinasi aset moneter dan aset nonmoneter, maka biaya perolehan diukur pada nilai wajar, kecuali (a) transaksi pertukaran tidak memiliki substansi komersial, atau (b) nilai wajar aset yang diterima atau aset yang diserahkan tidak dapat diukur secara andal. Dalam kasus tersebut, biaya perolehan diukur pada jumlah tercatat aset yang diserahkan.

PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO)
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN KECIL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Aset tetap dihentikan pengakuannya ketika:

- 1) Dilepaskan, atau
- 2) Ketika tidak ada manfaat ekonomi masa depan yang diekspektasikan dari penggunaan atau pelepasannya.

Pengeluaran Setelah Pengakuan Awal

Pengeluaran setelah pengakuan awal suatu aset tetap yang memperpanjang umur manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada jumlah tercatat aset tetap tersebut

Penyusutan

Penyusutan dimulai ketika suatu aset tersedia untuk digunakan, misalnya aset berada di lokasi dan kondisi yang diperlukan sehingga mampu beroperasi sebagaimana maksud manajemen. Penyusutan dihentikan ketika aset dihentikan pengakuannya. Penyusutan tidak dihentikan ketika aset tidak digunakan atau dihentikan penggunaan aktifnya, kecuali aset tersebut telah disusutkan secara penuh.

Aset tetap disusutkan berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap dengan menggunakan metode dan tarif penyusutan sebagai berikut:

<u>Keterangan</u>	<u>Metode Penyusutan</u>	<u>Tarif Penyusutan</u>
Inventaris dan peralatan	Garis lurus	25%

Jika terdapat suatu indikasi bahwa telah terjadi perubahan signifikan sejak tanggal pelaporan tahunan sebelumnya dalam pola penggunaan manfaat ekonomi masa depan aset, maka entitas harus menelaah ulang metode penyusutan saat ini dan (jika ekspektasi sekarang berbeda) mengubah metode penyusutan untuk mencerminkan pola yang baru. Entitas harus memperlakukan perubahan metode penyusutan sebagai perubahan estimasi akuntansi.

h Aset Lain-lain

Saldo aset lain-lain dalam laporan posisi keuangan terdiri dari: aset tetap tidak berfungsi dan piutang bermasalah-bersih.

Aset Tetap Tidak Berfungsi

Aset tetap yang sudah tidak digunakan atau tidak dioperasikan karena rusak atau sebab lain direklasifikasi menjadi aset tetap tidak produktif dan diturunkan nilainya sama dengan Rp1 (satu rupiah).

Piutang Bermasalah

Piutang pinjaman macet yang telah diupayakan pemulihannya (*rescheduling dan reconditioning*) namun tidak terpulihkan atau sebab lain yang menyebabkan piutang dapat dikategorikan menjadi piutang bermasalah, diakui pada saat piutang pinjaman yang dikategorikan macet dan telah diupayakan pemulihannya namun tidak terpulihkan. Piutang bermasalah diukur dan dicatat sebesar jumlah pokok pinjaman. Penyisihan piutang bermasalah diukur dan dicatat sebesar 100%.

i Penurunan Nilai

Pinjaman yang Diberikan dan Piutang

Penurunan nilai pinjaman yang diberikan dan piutang dibentuk sebesar estimasi kerugian yang tidak dapat ditagih. Dengan mempertimbangkan karakteristik PUMK maka metode perhitungan yang dipilih adalah secara kolektif berdasarkan prosentase tertentu tingkat ketertagihan (*collection*) data historis yang ada (minimal 2 tahun).

Aset Lainnya

Manajemen harus menilai pada setiap tanggal pelaporan apakah terdapat indikasi penurunan nilai aset. Jika indikasi tersebut ada, manajemen harus mengestimasi nilai wajar dikurangi dengan biaya untuk menjual aset tersebut. Juga mengindikasikan bahwa manajemen harus menelaah ulang sisa umur manfaat aset atau metode penyusutan (amortisasi) untuk aset.

PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO)
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN KECIL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Indikasi adanya kemungkinan penurunan nilai aset, dipengaruhi:

- 1) Sumber informasi eksternal
 - Selama periode tertentu, nilai pasar aset menurun secara signifikan lebih dari yang diekspektasikan akibat berlalunya waktu atau penggunaan normal.
 - Terjadi perubahan yang signifikan dengan pengaruh negatif dalam periode tertentu atau dalam waktu dekat dalam bidang lingkungan teknologi, pasar, ekonomi atau hukum dimana entitas beroperasi atau dalam pasar dimana aset tersebut diperuntukkan.
 - Tingkat suku bunga pasar atau tingkat kembalian investasi pasar mengalami kenaikan selama periode berjalan, dan kenaikan tersebut akan berpengaruh secara material terhadap tingkat diskonto untuk menghitung nilai aset dan menurunkan nilai wajar aset dikurangi biaya untuk menjual.
 - Jumlah tercatat dari aset bersih entitas lebih besar dibandingkan kapitalisasi pasarnya.
- 2) Sumber informasi internal
 - Tersedianya bukti keusangan atau kerusakan fisik dari aset.
 - Terjadi perubahan yang signifikan dengan pengaruh negatif pada periode tertentu atau dalam waktu dekat atas cara dan bagaimana aset digunakan atau diharapkan akan digunakan. Perubahan ini termasuk aset yang tidak digunakan, pabrik yang berhenti beroperasi atau restrukturisasi operasional dimana aset tersebut berlokasi, rencana untuk melepaskan aset sebelum tanggal yang diharapkan sebelumnya, dan penilaian ulang umur aset menjadi terbatas dari tidak terbatas.
 - Tersedianya bukti dari pelaporan internal yang mengindikasikan bahwa kinerja ekonomis dari aset (atau akan) memburuk dari yang diharapkan. Dalam konteks kinerja ekonomis ini termasuk hasil operasi dan arus kas

j Aset Neto

Aset neto diklasifikasikan menjadi aset neto tidak terikat dan aset neto terikat. Aset neto tidak terikat adalah sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu. Aset neto terikat adalah sumber daya yang penggunaannya dibatasi untuk tujuan tertentu atau tidak dapat digunakan untuk kegiatan operasional normal.

k Pendapatan

Alokasi Bagian Laba dari BUMN Pembina

Alokasi bagian laba dari BUMN pembina adalah alokasi dari BUMN pembina atas penyisihan laba setelah pajak BUMN pembina yang ditetapkan oleh RUPS/RPB untuk Unit PKBL (atau TJSL). Diakui pada saat RUPS/RPB telah menyetujui laporan keuangan BUMN pembina dan menetapkan besarnya alokasi laba untuk Unit PKBL (atau TJSL).

Penerimaan Pelimpahan Dana dari Unit PKBL (atau TJSL) Lain

Penerimaan pelimpahan dana dari Unit PKBL (atau TJSL) lain adalah jumlah dana yang diterima dari Unit PKBL (atau TJSL) BUMN lain tanpa kewajiban untuk mengembalikan untuk disalurkan kepada mitra binaan. Diakui pada saat diterimanya dana dari Unit PKBL (atau TJSL) lain.

Penggantian Beban Operasional

Penggantian beban operasional adalah penerimaan dana dari BUMN pembina atas penggantian beban operasional Unit PKBL (atau TJSL) yang melebihi batas pagu yang telah ditetapkan. Diakui pada saat diterima penggantian beban operasional.

Sumbangan

Sumbangan adalah sejumlah dana atau barang yang diterima dari pihak di luar Unit PKBL (atau TJSL) tanpa adanya imbalan prestasi, selain penerimaan pelimpahan dana dari Unit PKBL (atau TJSL) lainnya. Contohnya adalah dana dari BUMN pembina untuk Program PUMK ketika BUMN Pembina mengalami kerugian atau ketika tidak ada pembagian laba. Diakui pada saat dana atau barang diterima oleh Unit PKBL (atau TJSL).

PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO)
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN KECIL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman

Pendapatan jasa administrasi pinjaman adalah pendapatan jasa yang dipungut atas pinjaman dana program kemitraan yang disalurkan kepada mitra binaan, diakui secara akrual hanya pada piutang dengan status lancar dan kurang lancar.

Pendapatan Bunga

Pendapatan bunga adalah pendapatan yang berasal dari bunga deposito, jasa giro, bunga tabungan atau bunga simpanan lainnya, diakui secara akrual.

Pendapatan Lain-lain

Pendapatan lain-lain adalah pendapatan yang tidak dapat digolongkan menurut klasifikasi pendapatan di atas. Termasuk dalam pendapatan lain-lain di antaranya "Piutang Bermasalah Dihapus - Diterima Kembali", diakui pada saat diterima.

I Beban

Dana Pembinaan Kemitraan

Dana pembinaan kemitraan adalah penyaluran dana Unit PKBL (atau TJSL) sebagai salah satu bentuk pelaksanaan program kemitraan.

Dana pembinaan kemitraan diakui pada saat terjadinya penyaluran dana pembinaan kemitraan. Dana pembinaan kemitraan diukur dan dicatat sebesar jumlah dana yang dibayarkan dalam rangka pelaksanaan pembinaan kemitraan.

Pelimpahan Dana ke Unit PKBL (atau TJSL) Lain

Pelimpahan dana ke Unit PKBL (atau TJSL) lain adalah penyaluran dana kepada Unit PKBL (atau TJSL) lain, tanpa kewajiban untuk mengembalikannya, untuk disalurkan kepada mitra binaan. Pelimpahan dana ke Unit PKBL (atau TJSL) lain diakui pada saat terjadi penyerahan dana ke Unit PKBL (atau TJSL) lain.

Pelimpahan dana ke Unit PKBL (atau TJSL) lain diukur dan dicatat sebesar jumlah dana yang diserahkan ke Unit PKBL (atau TJSL) lain.

Beban meliputi beban pembinaan, umum dan administrasi, pemeliharaan, dan beban serta pengeluaran lainnya.

Beban diakui pada saat beban tersebut telah menjadi liabilitas sebagai akibat transaksi keuangan yang dilakukan oleh Unit PKBL (atau TJSL). Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang telah menjadi liabilitas sebagai akibat transaksi keuangan yang dilakukan oleh Unit PKBL (atau TJSL).

3. Kas dan Bank

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	<u>Rp</u>	<u>Rp</u>
Kas	4.687.041	2.053.920
Rekening Giro		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	213.381.865	35.093.891
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	108.631.624	105.027.813
Total	<u>326.700.530</u>	<u>142.175.624</u>

PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO)
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN KECIL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
 (Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

4. Piutang Pinjaman Mitra Binaan

	2021	2020
	Rp	Rp
Piutang Mitra Binaan	4.887.807.520	4.846.693.594
Penyisihan Penurunan	(1.308.312.443)	(1.363.102.600)
Jumlah Piutang Mitra Binaan-Bersih	3.579.495.077	3.483.590.994

Kolektibilitas piutang mitra binaan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

	2021	2020
	Rp	Rp
Lancar	3.266.914.000	3.000.648.902
Kurang lancar	261.722.880	463.856.000
Diragukan	196.467.900	300.093.714
Macet	1.162.702.740	1.082.094.978
Jumlah	4.887.807.520	4.846.693.594

Penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman per 31 Desember 2021 dan 2020 dihitung menggunakan *migration analysis method* berdasarkan data historis minimal 2 (dua) tahun, sebagai berikut:

2021			
Kolektibilitas Piutang Mitra Binaan	Piutang Rp	Persentase (%)	Akumulasi Penyisihan Rp
Lancar	3.266.914.000	3,17%	103.616.481
Kurang lancar	261.722.880	8,21%	21.497.763
Diragukan	196.467.900	10,43%	20.495.459
Macet	1.162.702.740	100,00%	1.162.702.740
Total	4.887.807.520		1.308.312.443
2020			
Kolektibilitas Piutang Mitra Binaan	Piutang Rp	Persentase (%)	Akumulasi Penyisihan Rp
Lancar	3.000.648.902	4,72%	141.637.631
Kurang lancar	463.856.000	12,19%	56.544.046
Diragukan	300.093.714	27,60%	82.825.945
Macet	1.082.094.978	100,00%	1.082.094.978
Total	4.846.693.594		1.363.102.600

Mutasi penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman adalah sebagai berikut:

	2021	2020
	Rp	Rp
Saldo Awal	1.363.102.600	804.392.292
Beban (Pemulihan) Penyisihan Piutang	(54.790.157)	558.710.308
Saldo Akhir	1.308.312.443	1.363.102.600

PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO)
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN KECIL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
 (Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

5. Aset Tetap

	2021			
	Saldo Awal Rp	Penambahan Rp	Pengurangan Rp	Saldo Akhir Rp
Biaya Perolehan				
Inventaris dan Peralatan Kantor	40.478.000	--	--	40.478.000
	<u>40.478.000</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>40.478.000</u>
Akumulasi Penyusutan				
Inventaris dan Peralatan Kantor	40.478.000	--	--	40.478.000
	<u>40.478.000</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>40.478.000</u>
Nilai Buku	<u>--</u>			<u>--</u>
	2020			
	Saldo Awal Rp	Penambahan Rp	Pengurangan Rp	Saldo Akhir Rp
Biaya Perolehan				
Inventaris dan Peralatan Kantor	40.478.000	--	--	40.478.000
	<u>40.478.000</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>40.478.000</u>
Akumulasi Penyusutan				
Inventaris dan Peralatan Kantor	40.478.000	--	--	40.478.000
	<u>40.478.000</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>40.478.000</u>
Nilai Buku	<u>--</u>			<u>--</u>

6. Aset Lain-lain

	2021 Rp	2020 Rp
Aset Tetap Tidak Berfungsi	28.477.750	28.477.750
Akumulasi Penurunan Nilai Aset Tetap Tidak Berfungsi	(28.477.750)	(28.477.750)
Piutang Bermasalah	4.316.437.323	4.373.379.656
Penyisihan Penurunan Nilai Piutang Bermasalah	(4.316.437.323)	(4.373.379.656)
Total	<u>--</u>	<u>--</u>
Mutasi penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman		
	2021 Rp	2020 Rp
Saldo Awal	4.373.379.656	4.413.121.823
Pemulihan (Catatan 9)	(56.942.333)	(39.742.167)
Saldo Akhir	<u>4.316.437.323</u>	<u>4.373.379.656</u>

Aset tetap tidak berfungsi merupakan aset tetap tidak berfungsi inventaris dan peralatan kantor yang telah dilakukan penurunan nilai sebesar nilai perolehannya.

Piutang bermasalah merupakan piutang pinjaman mitra binaan kategori macet yang telah diupayakan pemulihannya (*rescheduling dan reconditioning*) namun tidak terpulihkan.

Alokasi penyisihan piutang bermasalah yang mungkin tidak tertagih dihitung 100% dari saldo piutang bermasalah sesuai dengan Pedoman Akuntansi Program PKBL (atau TJSL) BUMN.

PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO)
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN KECIL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
 (Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

7. Utang Lain-lain

	2021	2020
	Rp	Rp
Angsuran Belum Teridentifikasi	132.847.588	132.847.588
Kelebihan Pembayaran Angsuran	3.075.060	3.985.060
Total	135.922.648	136.832.648

8. Aset Neto

	2021	2020
	Rp	Rp
ASET NETO TANPA PEMBATASAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA		
Saldo Awal	3.488.933.970	3.866.021.559
Surplus (Defisit)	281.338.989	(377.087.589)
Saldo Akhir	3.770.272.959	3.488.933.970
Penghasilan Komprehensif Lain	--	--
ASET NETO DENGAN PEMBATASAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA	--	--
TOTAL ASET NETO	3.770.272.959	3.488.933.970

9. Pendapatan

	2021	2020
	Rp	Rp
Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman	147.692.944	135.771.383
Pendapatan Bunga Deposito dan Jasa Giro	7.280.735	3.300.259
Pendapatan Lain-lain :		
Pemulihan Penyisihan Piutang	54.790.157	--
Pemulihan Nilai Piutang Bermasalah (Catatan 6)	56.942.333	39.742.167
Lainnya	22.058.300	5.188.640
Total	288.764.469	184.002.449

Pendapatan jasa administrasi pinjaman merupakan pendapatan jasa yang dipungut atas pinjaman dana program kemitraan yang disalurkan kepada mitra binaan termasuk pengakuan/akualisasi pendapatan jasa administrasi pinjaman dengan status lancar dan kurang lancar sebesar nilai yang telah jatuh tempo sesuai dengan kontrak.

10. Beban

	2021	2020
	Rp	Rp
Beban Administrasi dan Umum	4.176.647	2.379.730
Beban Lain-lain	3.248.833	--
Beban Penyisihan Piutang	--	558.710.308
Total	7.425.480	561.090.038

PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO)
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN KECIL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
 (Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

11. Informasi Tambahan

Kinerja Program Kemitraan

Penilaian kinerja PKBL (atau TJSL) berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No.Kep.100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 mencakup program kemitraan dengan indikator Tingkat Efektivitas Penyaluran dan Tingkat Kolektibilitas Pengembalian Pinjaman.

1) Efektivitas Penyaluran Dana

Tingkat efektivitas penyaluran dana dihitung dengan cara membagi jumlah dana yang disalurkan dengan jumlah dana yang tersedia. Jumlah dana yang disalurkan adalah seluruh dana yang disalurkan kepada usaha kecil dan koperasi dalam tahun yang bersangkutan yang terdiri dari pinjaman kerja dan hibah. Sedangkan jumlah dana yang tersedia terdiri dari saldo awal periode ditambah dengan pengembalian pinjaman (pokok ditambah bunga) dan pendapatan bunga.

	2021	2020
	Rp	Rp
Dana yang Disalurkan		
Pinjaman Kemitraan	2.255.000.000	2.120.000.000
Total Penyaluran Dana	2.255.000.000	2.120.000.000

Tabel penilaian tingkat penyerapan dana pinjaman kemitraan:

Tingkat Penyerapan (%)	>90	85 s.d 90	80 s.d 85	<80
Skor	3	2	1	0
Formula	$\frac{\text{Jumlah Dana yang Disalurkan}}{\text{Jumlah Dana yang Tersedia}} \times 100\%$			

Perhitungan efektivitas penyaluran sebagai berikut:

	2021	2020
Jumlah Dana yang Disalurkan	2.255.000.000	2.120.000.000
Jumlah Dana yang Tersedia	2.581.700.530	2.262.175.624
Hasil	87,35	93,72
Skor	2	3

2) Tingkat Kolektibilitas Penyaluran Pinjaman

Indikator lain dalam penilaian kinerja PUMK yaitu tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman yang mana memberi indikasi kemungkinan tertagihnya suatu pinjaman. Tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman merupakan perbandingan antara rata-rata tertimbang kolektibilitas pinjaman terhadap jumlah pinjaman yang disalurkan (saldo pinjaman).

Rata-rata tertimbang kolektibilitas pinjaman adalah perkalian antara bobot kolektibilitas (%) dengan saldo pinjaman berdasarkan kualitas pinjaman (lancar, kurang lancar, ragu-ragu, dan macet). Bobot kolektibilitas dengan kualitas lancar (100%), kurang lancar (75%), ragu-ragu (25%), dan macet (0%).

	2021		
	Jumlah	Bobot	Rata-rata
Kategori Kolektibilitas Saldo Pinjaman	Rp	Kolektibilitas	Tertimbang
			Kolektibilitas
			Rp
Lancar	3.266.914.000	1,00	3.266.914.000
Kurang lancar	261.722.880	0,75	196.292.160
Ragu-ragu	196.467.900	0,25	49.116.975
Macet	1.162.702.740	--	--
	4.887.807.520		3.512.323.135

PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO)
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN KECIL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
 (Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Kategori Kolektibilitas Saldo Pinjaman	2020		Rata-rata Tertimbang Kolektibilitas
	Jumlah Rp	Bobot Kolektibilitas	Rp
Lancar	3.000.648.902	1,00	3.000.648.902
Kurang lancar	463.856.000	0,75	347.892.000
Ragu-ragu	300.093.714	0,25	75.023.429
Macet	1.082.094.978	--	--
	4.846.693.594		3.423.564.331

Tabel penilaian:

Tingkat Penyerapan (%)	>70	40 s.d 70	10 s.d 40	<10
Skor	3	2	1	0
Formula	$\frac{\text{Rata - Rata Tertimbang Kolektabilitas Pinjaman}}{\text{Saldo Pinjaman yang di Salurkan Sampai Akhir Periode}} \times 100\%$			

	2021	2020
Rata-rata tertimbang kolektibilitas pinjaman	3.512.323.135	3.423.564.331
Saldo pinjaman yang disalurkan sampai dengan akhir periode	4.887.807.520	4.846.693.594
Hasil	71,86	70,64
Skor	3	3

3) Variabel Utama Pelaksanaan PUMK

Laporan utama pelaksanaan PUMK menyajikan informasi sumber dana dan penyaluran dana dan biaya operasional tahun 2021 dengan rincian dan uraian sebagai berikut:

No	Uraian Dana Tersedia:	Program Kemitraan
1	Saldo Awal per 31 Desember 2020	142.175.624
2	Alokasi laba dari BUMN pembina	--
3	Pengembalian pinjaman dari mitra binaan	2.267.959.574
4	Pengembalian dana dari BUMN pembina lain/lembaga penyalur	--
5	Pendapatan jasa administrasi pinjaman	147.692.944
6	Pendapatan lain	21.678.300
7	Jasa giro	7.280.735
8	Kelebihan pembayaran angsuran	(910.000)
9	Angsuran yang belum teridentifikasi	--
10	Biaya operasional	(4.176.647)
11	Dana tersedia (Jumlah 1 s.d 9)	2.581.700.530
	Penyaluran dana dan biaya operasional	
12	Penyaluran pinjaman kepada mitra	(2.255.000.000)
13	Penyaluran melalui BUMN pembina lain/lembaga penyalur	--
14	Penyaluran hibah/dana pembinaan	--
15	Penyaluran dana bina lingkungan	--
16	Penyaluran dana bina lingkungan BUMN peduli	--
17	Penyaluran dana pembinaan kemitraan	--
18	Jumlah Penyaluran Dana dan Biaya Operasional (Jumlah 11 s.d 17)	(2.255.000.000)
	Dana Tersedia per 31 Desember 2021 (10-18)	326.700.530

PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO)
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN KECIL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
 (Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

4) Realisasi Akumulasi Penyaluran Pendanaan UMK

Laporan realisasi akumulasi penyaluran PUMK berdasarkan jenis bantuan yang disalurkan menyajikan informasi realisasi penyaluran PUMK sampai dengan tahun 2021 dan 2020. Mulai tahun 2021 Pendanaan UMK diambil dari anggaran perusahaan dengan rincian dan uraian sebagai berikut:

Jenis Bantuan	Sampai dengan Tahun 2020	Penyaluran Tahun 2021	Sampai dengan Tahun 2021
Bantuan korban bencana alam	112.592.935	--	112.592.935
Bantuan pendidikan dan/atau pelatihan	143.394.500	--	143.394.500
Bantuan peningkatan kesehatan	288.029.011	5.100.000	293.129.011
Bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum	445.296.800	--	445.296.800
Bantuan sarana ibadah	340.602.307	2.000.000	342.602.307
Bantuan pelestarian alam	130.602.307	3.000.000	133.602.307
Pengentasan kemiskinan	849.500	--	849.500
Sub Jumlah	1.461.367.360	10.100.000	1.471.467.360
BL BUMN Peduli	526.332.252	--	526.332.252
Total	1.987.699.612	10.100.000	1.997.799.612

5) Realisasi Akumulasi Penyaluran Program Kemitraan

Laporan realisasi akumulasi penyaluran program kemitraan berdasarkan sektor usaha mitra binaan menyajikan informasi realisasi penyaluran program kemitraan sampai dengan tahun 2021 dan 2020 dengan rincian dan uraian sebagai berikut:

Sektor Usaha Mitra Binaan	Realisasi Sampai Dengan Tahun 2020		Realisasi Tahun 2021		Realisasi Sampai Dengan Tahun 2021	
	Jumlah Unit Mitra Binaan	Jumlah Rupiah	Jumlah Unit Mitra Binaan	Jumlah Rupiah	Jumlah Unit Mitra Binaan	Jumlah Rupiah
1	2	3	4	5		
Sektor Industri	123	3.051.541.040	6	295.000.000	129	3.346.541.040
Sektor Perdagangan	381	9.252.965.134	20	1.075.000.000	401	10.327.965.134
Sektor Pertanian/Perkebunan	17	480.373.000	3	180.000.000	20	660.373.000
Sektor Perikanan/Peternakan	73	1.364.696.060	5	215.000.000	78	1.579.696.060
Sektor Usaha Jasa	45	1.469.185.000	9	490.000.000	54	1.959.185.000
Sektor Usaha Lainnya	4	80.666.000	--	--	4	80.666.000
Dana Pembinaan Kemitraan	22	10.127.000	--	--	22	10.127.000
Total	665	15.709.553.234	43	2.255.000.000	708	17.964.553.234

6) Rencana dan Realisasi Penyaluran Program Kemitraan

Laporan rencana dan realisasi penyaluran program kemitraan berdasarkan sektor usaha mitra binaan menyajikan informasi prosentase realisasi tahun berjalan terhadap rencana dan realisasi tahun sebelumnya penyaluran program kemitraan tahun 2021 dan 2020 dengan rincian dan uraian sebagai berikut:

Sektor Usaha Mitra Binaan	Realisasi 2020	Rencana 2021	Realisasi 2021	Persentase Dibandingkan Tahun Sebelumnya	Persentase Dibandingkan Dengan Rencana
	Rp	Rp	Rp	Persentase Jumlah Rupiah	Persentase Jumlah Rupiah
Sektor Industri	460.000.000	317.500.000	295.000.000	69%	93%
Sektor Perdagangan	1.145.000.000	1.100.000.000	1.075.000.000	96%	98%
Sektor Pertanian/Perkebunan	110.000.000	60.000.000	180.000.000	0%	300%
Sektor Perikanan/Peternakan	85.000.000	90.000.000	215.000.000	106%	239%
Sektor Usaha Jasa	320.000.000	82.500.000	490.000.000	26%	594%
Total	2.120.000.000	1.650.000.000	2.255.000.000	78%	137%

PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO)
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN KECIL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
 (Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

7) Posisi Piutang Program Kemitraan

Laporan posisi piutang program kemitraan berdasarkan sektor mitra binaan menyajikan informasi prosentase posisi piutang dan jumlah mitra binaan terhadap tahun sebelumnya dengan rincian dan uraian sebagai berikut:

Sektor Usaha Mitra Binaan	Lancar		Kurang Lancar		Diragukan		Macet		Total	
	Jumlah Unit Mitra Binaan	Jumlah Rupiah	Jumlah Unit Mitra Binaan	Jumlah Rupiah	Jumlah Unit Mitra Binaan	Jumlah Rupiah	Jumlah Unit Mitra Binaan	Jumlah Rupiah	Jumlah Unit Mitra Binaan	Jumlah Rupiah
Sektor Industri	16	531.343.500	2	27.437.500	4	38.995.380	23	212.341.620	45	810.118.000
Sektor Perdagangan	59	1.662.216.500	10	171.944.380	4	64.026.000	63	692.629.980	136	2.590.816.860
Sektor Pertanian/Perkebunan	7	261.041.500	-	-	-	0	2	20.449.000	9	281.490.500
Sektor Perikanan/Peternakan	14	352.491.500	1	37.491.000	1	4.503.520	18	200.758.140	34	595.244.160
Sektor Usaha Jasa	13	459.821.000	1	24.850.000	3	88.943.000	3	20.858.000	20	594.472.000
Sektor Usaha Lainnya							1	15.666.000	1	15.666.000
Total	109	3.266.914.000	14	261.722.880	12	196.467.900	110	1.162.702.740	245	4.887.807.520

12. Peraturan Menteri Negara BUMN yang Berlaku Sampai Dengan Tahun Buku

- Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 Pasal 2 ayat (1) huruf e, tentang Badan Usaha Milik Negara, salah satu maksud dan tujuan pendirian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat, Pasal 88 tentang Badan Usaha Milik Negara mengatur BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN yang diatur dengan Keputusan Menteri;
- Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara nomor PER.09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015, PER.03/MBU/12/2016 tanggal 16 Desember 2016 dan PER-02/MBU/7/2017 tanggal 5 Juli 2017, tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha kecil dan Program Bina Lingkungan; Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara nomor PER-02/MBU/04/2020 tanggal 2 April 2020, tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
- Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara nomor PER.05/MBU/04/2021 yang diterbitkan pada tanggal 8 April 2021, tentang Program Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

13. Tanggung Jawab Pengurus Unit PKBL (atau TJSL) atas Laporan Keuangan

Pengurus Unit PKBL (atau TJSL) bertanggung jawab atas laporan keuangan yang diselesaikan dan diotorisasi oleh Pengurus untuk terbit pada tanggal 1 April 2022.